

**PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA
SELATAN)**

Regina Rahma Utami

Abstrak

Penyitaan dan Perampasan aset terpidana korupsi adalah langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralih atau hilangnya harta kekayaan dari terpidana korupsi, untuk disita sebagai pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Permasalahan: Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai upaya pengembalian kerugian negara dan Bagaimanakah upaya untuk memperkuat pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan tambahan informasi serta opini penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan akademisi. Studi ini menghasilkan temuan : mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi berupa; penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset, dan pengelolaan aset. Kemudian upaya untuk memperkuat pengembalian kerugian negara. Saran dalam penelitian ini adalah agar pemerintah meningkatkan fasilitas teknologi untuk dapat menunjang kinerja kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset dan eksekutif serta legislatif segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi Undang-Undang.

Kata Kunci : Penyitaan, Aset, Korupsi.

**ADMINISTRATION OF CORRUPTION ACTION ASSETS AS A
STATE RETURN EFFORTS
(CASE STUDY IN SOUTH JAKARTA PROSECUTION SERVICE)**

Regina Rahma Utami

Abstract

Confiscation and seizure of assets of convicted corruption is an anticipatory step that aims to save or prevent the transfer or loss of assets from convicted corruption, to be confiscated as a substitute for state losses due to criminal acts of corruption. Problems: What is the mechanism for the implementation of seizure of assets of corruption convicts by the South Jakarta District Prosecutor's Office as an effort to recover state losses and how to strengthen the state's loss of return. The method used is normative juridical approach to law and additional information and law enforcement opinions from the South Jakarta District Attorney and academics. This study resulted in findings: the mechanism for the implementation of seizure of assets of corruption convicts in the form of; asset tracking, asset freezing, asset seizure, asset seizure, and asset management. Then efforts to strengthen state losses. The suggestions in this study are for the government to improve technology facilities to support the prosecutor's performance in conducting asset seizures and the executive and legislative immediately ratify the draft Criminal Asset Deprivation bill into law.

Keywords : Forclosure, Assets, Corruption.